

I. RINCIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN TIDAK TERDUGA

No	URAIAN		KOORDINATOR (VERIFIKATOR ADMINISTRASI)	SKPD YANG MEMBIDANGI (VERIFIKATOR TEKNIS)
1	2		3	4
1	Belanja Hibah			
	1.1	Palang Merah Indonesia	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial
	1.2	KONI dan Cabang Olahraga	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	1.3	Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan	Bagian Perekonomian	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan.
	1.4	Pendampingan Program Rintisan Wajar Pendidikan Menengah (Dikmen) 12 Tahun	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan.
	1.5	Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi Sosial (JPES)	Bagian Perekonomian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

	1.6	Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan	Bagian Perekonomian	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan.
	1.7	Pendampingan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)	Bagian Perekonomian	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan
	1.8	Pendampingan Gerdu Taskin (Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan)	Bagian Perekonomian	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan.
	1.9	Pendampingan laboratorium bahasa multimedia sistem	Bagian Pengelola Data Elektronik	Dinas Pendidikan.
	1.10	Belanja Hibah pajak penerangan listrik (Kecamatan Poncokusumo dan Tajinan)	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
	1.11	Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (<i>Block Grant</i>)	Bagian Perekonomian	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan.
	1.12	Belanja Hibah untuk Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan.
	1.13	Belanja Hibah untuk Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2008	Bagian Tata Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	1.14	Belanja Hibah kepada Organisasi Wanita	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
	1.15	Belanja Hibah kepada Organisasi Pemuda	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olah Raga.
	1.16	Bantuan Hibah kepada Program Kesejahteraan Keluarga / PKK	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
	1.17	Belanja Hibah kepada Badan Narkotika Kabupaten(BNK)/Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Malang	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial

	1.18	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial
	1.19	Dewan Majelis Indonesia (DMI) Kabupaten Malang	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial
	1.20	Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Malang	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial
	1.21	Infrastruktur Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat
2	Belanja Bantuan Sosial			
	2.1	Bantuan Keuangan menunjang kegiatan Pemerintah Daerah	Bagian Umum dan Protokol	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
	2.2	Bantuan Keuangan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bagian Umum dan Protokol	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
	2.3	Bantuan Keuangan kepada Perguruan Tinggi	Bagian Kerjasama	Badan Perencanaan Pembangunan.
	2.4	Bantuan Keuangan untuk keagamaan	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial.
	2.5	Bantuan Keuangan kepada lembaga pendidikan swasta	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Pendidikan, Kantor Departemen Agama, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
	2.6	Bantuan Keuangan untuk menunjang kemitraan Pemerintah Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
	2.7	Bantuan Keuangan untuk insentif Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan.
	2.8	Bantuan Keuangan operasional Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida)	Bagian Hukum	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	2.9	Bantuan Keuangan Tambahan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan.
	2.10	Bantuan Keuangan pada tempat ibadah dan pondok pesantren	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial, Kantor Departemen Agama.

	2.11	Bantuan Keuangan untuk kesejahteraan sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial.
	2.12	Bantuan Keuangan untuk pembinaan kesenian budaya	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
	2.13	Bantuan Keuangan untuk relokasi pemukiman pasca bencana di Gedangan	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Kantor Perumahan
	2.14	Bantuan untuk Guru Tidak Tetap (insentif) 1.508 org x Rp.500.000,-	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan.
	2.15	Bantuan Keuangan untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Miskin	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
	2.16	Bantuan Pelaksanaan Pilgub dari Provinsi	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat
	2.17	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Pendidikan
3		Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa		
	3.1	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tertentu	Bagian Perekonomian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
	3.2	Belanja Bagi Hasil atas perhitungan pajak penerangan jalan desa/kelurahan.	Bagian Perekonomian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset .
	3.3	Belanja Bagi Hasil untuk retribusi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) kepada koperasi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008	Bagian Perekonomian	Dinas Kelautan dan Perikanan.
	3.4	Belanja Bagi Hasil retribusi terminal Landungsari dengan desa Tahun 2008	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

	3.5	Belanja Bagi Hasil Tempat Pendaratan Ikan (TPI) ke Koperasi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2007	Bagian Perekonomian	Dinas Kelautan dan Perikanan.
	3.6	Belanja Bagi Hasil retribusi terminal Landungsari dengan desa Tahun 2007	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
4		Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
	4.1	Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat.
	4.2	Tunjangan Tetap Perangkat Desa: - Kepala Desa: 1 Org x 378 Desa x 12 Bln - Sekdes: 1 Org x 378 Desa x 12 Bln - Perangkat Desa: 3.595 Org x 12 Bln	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
	4.3	Tunjangan Sekretaris Desa yang tidak diangkat PNS (96 orang)	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, dan Badan Kepegawaian Daerah.
5		Belanja Tidak Terduga		
	5.1	Belanja Tidak Terduga	Bagian Administrasi Pembangunan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 06 Nopember 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 11/A